



**DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI TAHUN 2023**

No	Judul Informasi	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
						Cetak	Soft-Copy	
1.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Berisi Peraturan Gubernur Bali tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sekretaris	Kepala Dinas	2016	v	v	Aktif
2.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	Berisi Peraturan Gubernur Bali tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	Sekretaris	Kepala Dinas	2017	v	v	Aktif
3.	Peta Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, UPTD BLKIP, UPTD Hyperkes dan Keselamatan Kerja	Berisi tentang Peta Struktur Organisasi di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, UPTD BLKIP, UPTD Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali	Sekretaris	Kepala Dinas	2023	v	v	Aktif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4.	Upah Minimum Kabupaten/Kota	Berisi Peraturan Gubernur Bali tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023	Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan	Kepala Dinas	2022	v	v	Aktif
5.	Upah Minimum Provinsi	Berisi tentang Peraturan Gubernur Bali tentang Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2023	Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan	Kepala Dinas	2022	v	v	Aktif
6.	Rencana Startegis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2018-2023	Berisi informasi tentang program-program dan rencana yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2018-2023 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2019 – 2023	Sekretaris	Kepala Dinas	2020	v	v	Aktif
7.	Kartu Inventaris Barang	Berisi informasi tentang Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	Sekretaris	Kepala Dinas	2020	v	v	Aktif



8.	Kegiatan dan Informasi terkait Tugas Pokok Fungsi Dinas	Berisi informasi tentang kegiatan-kegiatan menyangkut tugas pokok dan fungsi seluruh Bidang dan UPTD Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	Sekretaris	Kepala Dinas	2023	v	v	Aktif
9	Keputusan Kepala Dinas	Berisi tentang Surat Keputusan Kepala Dinas yang telah dikeluarkan	Sekretaris	Kepala Dinas	2023	v	v	Aktif
10	Data Ketenagakerjaan Pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2022	Berisi tentang data Ketenagakerjaan Pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2022	Sekretaris	Kepala Dinas	2023	v	v	Aktif

Ditandatangani secara elektronik oleh :  

**KEPALA DINAS**  
**Ida Bagus Setiawan**  
NIP. 19710420 199803 1 005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI  
TAHUN 2023**

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1.	Data Informasi tentang Pengaduan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a</li> </ul>	Tidak Terbatas	mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Identitas/biodata pelapor terjamin kerahasiaannya
2.	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i</li> </ul>	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
3.	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
4.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
5.	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen

Ditandatangani secara elektronik oleh :  

**KEPALA DINAS**  
**Ida Bagus Setiawan**  
 NIP. 19710420 199803 1 005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE